

DETERMINAN KETIMPANGAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN / KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tahun 2011-2018

Imro Atus Sholikah

Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : imroicka12AP2@gmail.com

Abstract : Economic development can not be separated with economic growth. The State of economic growth from one region to another is due to the characteristic kaerana of each region. The difference in the pace of ekinomy growth between other regions causes economic inequality to be overcome. Determinant of economic inequality is influenced by economic and non-economic factors such as human Development Index (HDI), gross Regional domestic income per capita (PDRB per capita), regional genuine income (PAD), and General Allocation Fund (DAU). This research aims to determine the determinant of economic inequality in Yogyakarta special region in 2011-2018. This research is a quantitative study. The Data used is a crosssection of 5 districts/cities in the province of D. I Yogyakarta and time series for 2011-2018. Data is processed by analysis of the data panel with fixed effect model regression. All variables in the research are simultaneously influential against income inequality. A partial DAU variable is significantly positive and significant to the Gini index. Meanwhile, the variable PDRB per capita, IPM, PAD, has negative and significant effect on the Gini index.

Key words: inequality, indeks gini, HDI, determinant

*Abstrak : Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan ekonomi. Keadaan pertumbuhan ekonomi dari daerah satu dengan daerah lainnya salah satunya disebabkan kaerana ciri khas daerah masing-masing. Perbedaan laju pertumbuhan ekinomi antar daerah lainnya menyebabkan ketimpangan ekonomi sulit diatasi. Determinan ketimpangan ekonomi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non ekonomi seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB per kapita), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan ketimpangan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berupa *cross section* 5 kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta dan *time series* selama 2011-2018. Data diolah dengan analisis data panel dengan regresi *fixed effect model*. Seluruh variabel dalam penelitian berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara parsial variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks gini. Sementara itu variabel PDRB per kapita , IPM, PAD, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks gini. Kata kunci: ketimpangan.*

Kata Kunci : Indeks gini, determinan, panel, fixed effect.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di suatu Negara memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas atau taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kesejahteraan masyarakat di dalam suatu Negara dapat dilihat dari kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita. Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah juga bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian suatu wilayah dalam keadaan baik. Sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka menggambarkan bahwa perekonomian dalam keadaan yang tidak baik. Pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah, apabila tidak diimbangi dengan pemerataan maka akan mengakibatkan ketimpangan daerah tersebut semakin tinggi.

Pembangunan ekonomi memiliki arti yang luas dari konsep pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2004), pembangunan ekonomi yaitu suatu kenyataan serta tekad masyarakat yang berbentuk fisik untuk berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan kombinasi proses ekonomi, sosial, dan institusional demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan untuk kehidupan yang lebih baik. Menurut Sukirno (2013), pembangunan ekonomi akan tercapai apabila pendapatan per kapita masyarakat terus bertambah pada tingkat yang cepat.

Menurut Prawoto (2014) pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan dari produk nasional bruto. Arsyad (2010) mengatakan ekonomi tumbuh ditandai dengan naiknya *Gross Domestic Product* (GDP) maupun *Gross National Product* (GNP) baik itu naikannya lebih besar maupun lebih kecil dari rasio pertumbuhan penduduk serta tidak melihat apakah terjadi perubahan dari pola ekonomi atau tidak. Prawoto dan Basuki (2004), menyatakan bahwa

pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat. Menurut Sukirno (2005) pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu dalam hal laju pertumbuhan ekonomi antar daerah dan daerah lainnya terdapat perbedaan. Ini dikarenakan setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Menurut Sukirno (2005) ada 4 hal yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, pemikiran ini didasari pada pandangan ekonom klasik dan neo klasik, yaitu, tanah serta kekayaan 4 alam, penduduk dan tenaga kerja serta kualitas dari penduduk, ketersediaan barang modal serta teknologi yang digunakan

Adanya *trade off* antara laju pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan mengakibatkan masalah ketimpangan ekonomi sulit untuk diatasi. Karena pembangunan ekonomi memiliki konsep yang luas yaitu pada kualitas pembangunan yang dilakukan dan diikuti dengan masalah-masalah lainnya seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendidikan serta struktural yang tidak seimbang. Pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah, apabila tidak diimbangi dengan pemerataan maka akan mengakibatkan ketimpangan daerah tersebut semakin tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan tersebut merupakan permasalahan penting di suatu wilayah yang harus segera diatasi karena ketimpangan pendapatan dampaknya bukan hanya dalam hal ekonomi tetapi juga dalam hal sosial.

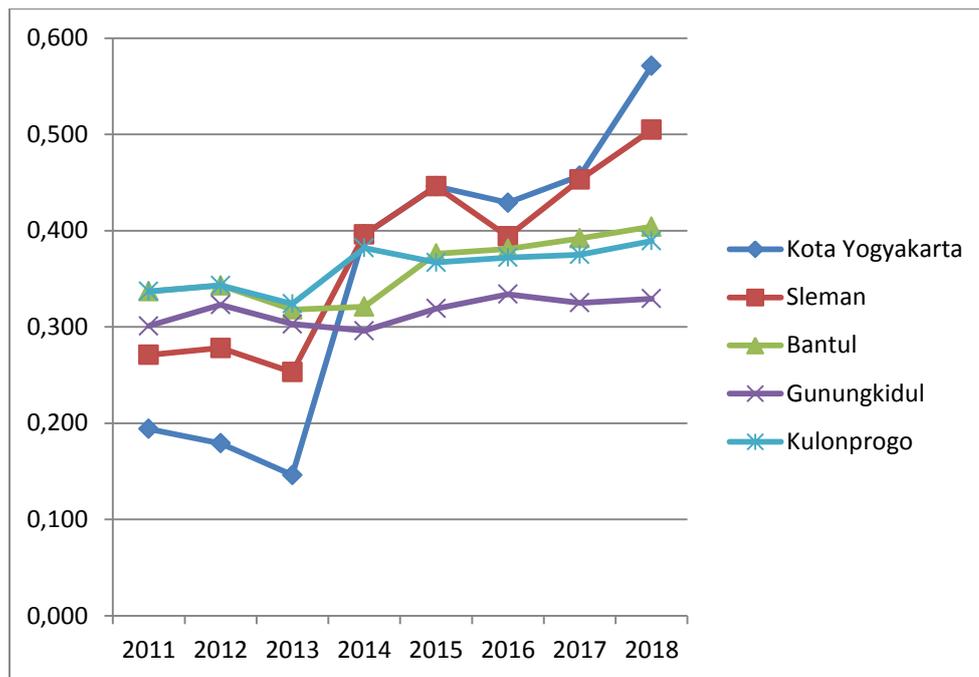
Hartini (2017) Indikator yang digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah yaitu pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Namun bukan hanya dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keberhasilan pembangunan dapat

dilihat melalui keberhasilan indikator lain yaitu indikator sosial, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni pada meningkatnya kualitas kesehatan, pendidikan dan kemudahan untuk mengakses suatu informasi.

Pengertian PDRB menurut BPS yaitu nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi melalui unit-unit ekonomi dan waktu tertentu. Sementara itu, hasil dari kegiatan ekonomi melalui unit-unit ekonomi kemudian dibagi jumlah penduduk wilayah tertentu kemudian menghasilkan PDRB per kapita. Kegiatan ekonomi tersebut disumbang oleh sembilan sektor yaitu pertanian, perdagangan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, listrik dan gas serta air bersih, bangunan, restoran dan hotel, komunikasi dan pengangkutan, penyewaan dan keuangan serta jasa perusahaan dan jasa-jasa

Taharah (2018) PDRB Perkapita juga menjadi salah satu indikator untuk mengetahui bagaimana kondisi disuatu wilayah dalam periode tertentu, dapat di lihat dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konsta atau atas harga berlaku. Jika pendapatan perkapita mengalami peningkatan, otomatis akan mendorong naiknya tingkat daya beli atau konsumsi masyarakat. Ketika daya beli atau konsumsi masyarakat meningkat otomatis juga akan mendorong meningkatnya produksi barang dan jasa.

Secara riil atau atas dasar harga konstan 2010, PDRB per kapita meningkat dari Rp18,65 juta di tahun 2010 menjadi Rp25,78 juta di tahun 2018 atau rata-rata tumbuh 4,13 persen per tahun. Secara kasar, peningkatan level tersebut menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk DIY secara rata-rata yang semakin membaik dengan asumsi faktor produksi yang menggerakkan perekonomian dimiliki oleh penduduk/residen DIY. Pertumbuhan PDRB per kapita riil memiliki pola yang searah dengan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, level pertumbuhan PDRB per kapita riil tercatat lebih rendah karena dikoreksi oleh laju pertumbuhan penduduk DIY setiap tahun.



Sumber : Data Diolah , 2019

GAMBAR 1.1
Indeks Gini Kabupaten/ Kota DIY

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan tersebut yaitu menggunakan Indeks Gini yang memiliki nilai 0 sampai dengan 1. Rasio gini kecil lebih kecil dari 0,4 menunjukkan ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi. Untuk melihat nilai rasio gini di provinsi D.I Yogyakarta berdasarkan pada kurun waktu 2011-2018 dapat dilihat pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa Indeks Gini pada tahun 2018, Kabupaten Kota Yogyakarta menempati angka Indeks Gini paling tinggi diantara 5 Kabupaten/Kota lainnya. Pada tahun 2018 indeks gini provinsi D.I Yogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan paling tinggi di Indonesia. Tingkat kesenjangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin tinggi. Bahkan kesenjangan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini berada di atas angka nasional. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) angka gini ratio provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 0,442, sedangkan nasional 0,391. Melihat cukup besar dampak yang ditimbulkan akibat ketimpangan distribusi

pendapatan, maka diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan ketimpangan pendapatan di provinsi D.I Yogyakarta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB Per Kapita , Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan atau Indeks Gini di Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

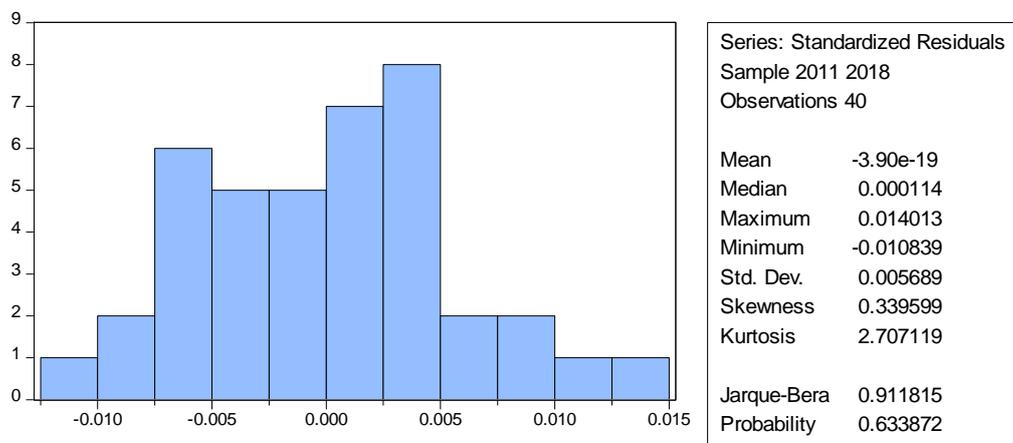
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung atau data yang sudah diolah. Data Sekunder dalam penelitian ini menggunakan data gabungan antar waktu (*time series*) yaitu pada tahun 2011 – 2018 dan data antar tempat (*cross section*) yang dari seluruh Kabupaten D.I Yogyakarta. Data gabungan antar waktu (*time series*) dan tempat (*cross section*) disebut dengan Data Panel. Sehingga analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Panel. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Gini yang ada di Kabupaten/ Kota di D.I Yogyakarta. Pemilihan variabel tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi Indeks Gini di seluruh Kabupaten / Kota D.I Yogyakarta. Selain itu untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi keuangan inklusif, peneliti menggunakan variabel PDRB Perkapita, IPM, PAD, dan DAU di Kabupaten/ Kota D.I Yogyakarta. Untuk menguji kualitas data dalam penelitian yaitu menggunakan Uji Asumsi Klasik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Kaulitas Data

Dalam penelitian ini uji kualitas data menggunakan uji asumsi klasik. Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normality



Sumber : Data Diolah, 2019

GAMBAR 2.1
Hasil Uji Normality

Dapat dilihat pada gambar 5.1 diatas, berdasarkan uji normalitas probabilitas ditunjukkan dengan angka sebesar 0,633872 Hal ini berarti bahwa prob $>5\%$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang kuat antara variabel bebas, hal itu dikarenakan akan mempengaruhi pada keakuratan penduga parameter, atau koefisien regresi dalam memperkirakan nilai yang sebenarnya.

TABEL 1.1
Hasil Uji Multikolinieritas

	INDEKSGINI	PDRB	IPM	PAD	DAU
INDEKSGINI	1	0.987699	0.793325	0.62916	-0.26964
PDRB	0.987699	1	0.73501	0.548078	-0.30072
IPM	0.793325	0.73501	1	0.800878	-0.07882
PAD	0.62916	0.548078	0.800878	1	0.084793
DAU	-0.26964	-0.30072	-0.07882	0.084793	1

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas. Dimana nilai koefisien korelasi variabel independent berada dibawah 0,85, sehingga model ini tidak terdapat multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada jenis data *cross section*. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 1.2
Hasil Uji Hterokedasitas

Variabel	Probabilitas
C	0.3075
PDRB	0.6651
IPM	0.2181
PAD	0.4111
DAU	0.5933

Sumber : Data Diolah, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa semua nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB per kapita, IPM , PAD dan DAU tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pemilihan Metode Pengujian Data Panel

1. Pemilihan Model Analisis

Dalam data panel ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi. Pertama, uji statistik F atau Uji Chow yang digunakan untuk memilih antara metode *fixed effect* atau metode *common effect*. Kedua, Uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode *fixed effect* atau metode *random effect*. Ketiga, Uji Lagrange Multiplier (LM) yang digunakan untuk memilih antara metode *common effect* dan metode *random effect*.

a. Uji Chow

Uji chow merupakan uji yang dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat antara *fixed effect* dengan *common effect*. Jika hasil menyatakan menerima hipotesis nol maka metode terbaik yang digunakan adalah metode *common effect*. Tetapi jika hasil menolak hipotesis nol maka metode terbaik yang digunakan dalam penelitian adalah *fixed effect*.

TABEL 3.1
Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-Section F	84..48498	(4,31)	0.0000

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai probabilitas crosssection F sebesar 0,0000 yang nilainya $< 0,05$ sehingga menolak hipotesis nol. Dapat disimpulkan bahwa metode *fixed effect model* lebih tepat digunakan dalam penelitian ini dibandingkan dengan metode *common effect model*.

b. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji yang digunakan untuk menentukan metode apa yang paling tepat antara metode *fixed effect model* atau *random effect model*. Apabila hasil menyatakan menerima hipotesis nol, maka metode yang paling tepat untuk digunakan adalah *random effect model*. Namun, apabila hasil yang diperoleh menyatakan menolak hipotesis nol, maka model yang paling tepat digunakan adalah *fixed effect model*.

TABEL 4.1
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.229931	4	0.0157

Sumber : Data Diolah, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai probabilitas cross section random. Apabila nilainya $> 0,05$ maka model yang terpilih adalah *random effect*, tapi apabila nilainya $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah *fixed effect*. Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai prob. *cross-section* random sebesar 0.0000 yang mana nilainya $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *random effect* digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Estimasi Model Regresi Panel

Setelah pengujian statistik untuk menentukan model mana yang akan dipilih dalam penelitian ini, maka disimpulkan bahwa *model fixed effect* yang akan digunakan. Berikut disajikan tabel yang menunjukkan hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 5 kabupaten dalam periode 2011-2018.

TABEL 5.1
Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variable	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
PDRB PERKPT	-0.05652	-72.64231	0.0000
IPM	-0.03782	-2.399037	0.0226
PAD	-0.00019	-1.715824	0.0162
DAU	1.30E-06	0.021109	0.0133

Sumber : Data Diolah, 2019

Dari tabel 5.6 diatas, hasil analisis regresi model *fixed effect* diketahui nilai probabilitas untuk variabel PDRB per kapita, variabel IPM , variabel PAD dan variabel DAU signifikan dalam taraf error 5%.

Uji Statistik

1. Uji t-statistik.

Uji t-statistik bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independent secara individual dalam menerangkan variabel dependent

TABEL 6.1
Hasil Uji-t Statistik

Variabel	Koefisien Regresi	Prob.
PDRB Per Kapita	-0.056522	0.0000
IPM	-0.037822	0.0226
PAD	-0.000192	0.0162
DAU	1.30E-06	0.0133

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan hasil regresi data diatas diketahui bahwa koefisien regresi untuk variable PDRB Per Kapita adalah -0.056522 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0053 yang signifikan pada taraf 5 persen. Sehingga variable PDRB Per Kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan distribusi Pendapatan. .

Hasil Uji t-statistik variabel IPM yaitu dengan koefisien sebesar -2.701999 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang signifikan pada taraf 5 persen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Hasil Uji t-statistik pada variable PAD yaitu sebesar -8.20E-11 dengan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0.0000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas signifikan pada taraf 5 persen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Variabel DAU memiliki koefisien sebesar 0.006554 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0044 yang signifikan pada taraf 5 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variable DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

2. Uji F-Statistik

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect* dimana dalam estimasi model nilai probabilitas F-statistik adalah sebesar 0.000000. Hal ini berarti bahwa variabel independent PDRB Per Kapita, IPM, PAD, dan DAU secara bersamaan mempengaruhi variabel dependent yaitu Ketimpangan Distribusi Pendapatan

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan himpunan variasi variabel dependen. Dari hasil estimasi model *fixed effect* dapat diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0.999984 hal ini berarti bahwa model ini mampu menjelaskan variabel

dependent sebesar 99,9 persen, sedangkan sisanya sebesar 1,1 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Pembahasan

1. Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Indeks Gini

Pengaruh PDRB Per kapita terhadap Indeks Gini berdasarkan hasil regresi data panel dengan model *Fixed Effect* Model diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0000 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas $< \alpha$ 5%, sedangkan nilai koefisien yang diperoleh yaitu sebesar -0.056522 artinya variable PDRB Perkapita berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks gini di Kabupaten/Kota D.I.Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal bahwa variable PDRB Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Gini. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai PDRB Perkapita sebesar 1 juta rupiah maka akan menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan 0.056522 persen.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Syilviarani (2017) dengan hasil penelitian yaitu Variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan (Indek Gini) di Pulau Jawa dengan koefisien regresi sebesar 0.00000082. Selain itu penelitian dari Safrianto (2018) diperoleh hasil bahwa pabila terjadi kenaikan 1 juta rupiah PDRB per kapita, maka akan menurunkan Indeks Gini sebesar 0,00000000625 poin terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di D.I.Yogyakaera tahun 2011-2017.

2. Pengaruh IPM terhadap Indeks Gini

Dari hasil regresi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa IPM memiliki probabilitas 0.0226 $< \alpha$ 5% yang berarti bahwa variable IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/ Kota di D.I Yogyakarta. Sedangkan nilai

koefisien variable IPM yaitu sebesar -0.037822 yang artinya bahwa Indeks pembangunan berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal bahwa variable IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Indeks Gini). Artinya apabila terjadi kenaikan IPM sebesar 1 persen maka indeks gini akan turun sebesar 0.037822 persen. Hasil ini sesuai dengan Teori Human Capital yaitu bahwa kualitas pembangunan manusia memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan.

IPM secara khusus merupakan mengukur capaian pembangunan manusia menggunakan beberapa komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke empat komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan. Dengan adanya peningkatan IPM diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan yang semakin membesar antar daerahnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hartini (2017) yang diperoleh hasil bahwa koefisien variabel IPM sebesar $-0,000351$ dengan probabilitas sebesar $0,0214$. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya kenaikan 1% nilai IPM akan diikuti penurunan ketimpangan pendapatan sebesar $0,000351$ %.

3. Pengaruh PAD terhadap Indeks Gini

Dari hasil regresi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa PAD memiliki probabilitas $0.0162 < \alpha 5\%$ yang artinya bahwa variable PAD berpengaruh signifikan terhadap Indeks

Gini. Sedangkan nilai koefisien yang diperoleh adalah sebesar -0.000192 maka dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap Indeks Gini. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan PAD sebesar 1 juta rupiah maka Indeks Gini akan mengalami penurunan sebesar 0.000192 persen.

PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain adalah PAD yang sah. Hal ini bisa terjadi karena dengan adanya peningkatan PAD pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dapat mengoptimalkan PAD. Peningkatan PAD dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan. Peran PAD yaitu sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan yang semakin membesar antar daerahnya.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Taharah (2018) hasil regresi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki probabilitas $0.0066 < \alpha$ 5% maka menolak H_0 dan gagal menolak H_a yang berarti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/ Kota di D.I Yogyakarta hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal bahwa PAD berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

4. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Gini

Hasil nilai probabilitas yang diperoleh dari variable DAU memiliki probabilitas sebesar $0.0133 < \alpha$ 5%, sedangkan nilai koefisien DAU adalah sebesar $1.30E-06$. Hal ini menunjukkan bahwa variable DAU positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Indeks Gini) di D.I.Yogyakarta. Maka dapat disimpulkan apabila DAU mengalami

kenaikan sebesar 1 juta rupiah maka akan Indeks Gini akan meningkat sebesar 0.00000130 persen.

Hal ini disebabkan setiap DAU yang diterima oleh pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah salah satunya untuk belanja modal. Kenaikan DAU ditandai dengan pembangunan infrastruktur dan saran prasarana oleh pemerintah daerah yang akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai ketimpangan distribusi pendapatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Taharah (2018) yang diperoleh hasil DAU memiliki probabilitas sebesar $0.0053 < \alpha 5\%$ maka artinya variable DAU berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di D.I Yogyakarta hal ini menunjukkan jika DAU mengalami kenaikan maka ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota juga akan mengalami kenaikan Pemberian DAU oleh pemerintah ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah. Alokasi DAU untuk belanja pembangunan memungkinkan sesuatu daerah untuk meningkatkan pendapatan yang akhirnya akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain belanja pembangunan, belanja modal juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Variable PDRB Per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Gini. Artinya bahwa apabila PDRB Per kapita meningkat maka Indeks Gini di D.I Yogyakarta akan turun. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal dan sesuai dengan penelitian Syilviarani (2017) dengan hasil penelitian yaitu Variabel PDRB

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan (Indek Gini) di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan nilai PDRB per kapita yang merupakan rata-rata pendapatan penduduk dimungkinkan tinggi karena terdapat sejumlah orang yang berpenghasilan sangat tinggi di dalam suatu wilayah. Selain itu, perbedaan pendapatan dari suatu sektor ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan.

2. Variable IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Gini. Artinya bahwa apabila IPM mengalami kenaikan maka Indeks Gini akan turun. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal dan sesuai dengan penelitian Hartini (2017) bahwa IPM memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Indeks Gini. Hal ini terjadi karena nilai IPM yang tinggi mengindikasikan pembangunan manusia yang baik, salah satunya pendidikan. Pendidikan formal yang semakin tinggi akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan.
3. Variable PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Gini. Artinya bahwa apabila PAD meningkat maka Indeks Gini akan menurun. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal dan sesuai dengan penelitian Taharah (2017) dengan hasil PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan Indeks Gini di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta. Hal ini terjadi karena dengan adanya peningkatan PAD pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat mengoptimalkan PAD karena PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan.
4. Variable DAU berpengaruh positif dan signifikan. Artinya bahwa apabila DAU meningkat maka Indeks Gini juga mengalami kenaikan. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal dan sesuai dengan penelitian Natha (2015) dengan hasil bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Gini di Bali. . Hal ini terjadi pada saat kenaikan DAU ditandai dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana

oleh pemerintah daerah yang akan berdampak pada ketidakmerataan penghasilan di Kabupaten/Kota dengan kenaikan Indeks Gini.

Saran

1. Pemerintah sebaiknya melakukan peningkatan program-program pemerintah yang lebih difokuskan kepada masyarakat golongan ekonomi rendah sehingga pemerataan pendapatan akan tercapai. Sehingga masyarakat dalam kategori berpendapatan rendah dapat mencapai PDRB Per Kapita yang lebih tinggi karena variabel PDRB Per Kapita berpengaruh terhadap Indeks Gini di Yogyakarta.
2. Pemerintah perlu mengakselerasi program-program pemerataan pembangunan SDM secara proposional di seluruh wilayah. Dengan demikian, proses pembangunan yang terjadi tidak hanya bias pada wilayah yang sudah maju saja, tetapi juga pada wilayah-wilayah lainnya yang dianggap masih tertinggal. Peingkatan IPM diyakini dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi nasional dan memperbaiki tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Pengalokasian PAD yang dilakukan pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan agar mengalokasikan belanja daerah kepada sektor-sektor yang efektif untuk kesejahteraan masyarakat, dengan semakin banyaknya peningkatan PAD daerah pada sektor-sektor yang dirasa membutuhkan perhatian khusus maka akan secara langsung mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.
4. Pengalokasian Dana Alokasi Umum lebih banyak kepada daerah-daerah yang memiliki kondisi demografis yang kurang sehingga daerah-daerah tersebut memiliki

lebih banyak pendapatan untuk dialokasikan sebagai belanja daerah demi terciptanya kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 2010. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. (Edisi Kedua). Yogyakarta, Indonesia: BPF.
- Astuti, Riska Dwi. 2015. Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2013. *Diss.* Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta Badan Pusat Statistik. Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kotadi D.I Yogyakarta tahun 2011-2018.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kotadi D.I Yogyakarta tahun 2011-2018
- BPS. 2019. Bantul Dalam Angka <https://bantulkab.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 1 Desember 2019
- BPS. 2019. Gunung Kidul Dalam Angka <https://gunungkidulkab.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 27 November 2019
- BPS. 2019. Kota Yogyakarta Dalam Angka <https://jogjakota.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 27 November 2019
- BPS. 2019. Kulon Progo Dalam Angka <https://kulonprogokab.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 1 Desember 2019
- BPS. 2019. Sleman Dalam Angka <https://slemankab.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 27 November 2019
- Cingano, Federico. 2014. Trends in income inequality and its impact on economic growth. 163 : 7-9
- Hartini, Nita Tri. 2017. Pengaruh PDRB per kapita, investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi DIY tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi* : 530-539.
- Hartono, Budiantoro. 2017. Analisis ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi Jawa Tengah. *Diss.* Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Ihsan, Rifki, Hasdi Aimon, and Alpon Satrianto. 2019. Analisis Kaulitas Inflasi Ketimpangan Pendapatan, dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ecogen* 1.3: 701-711.
- Karim, Nur Azmi, Iston Dwija Utama, and Rudy Aryanto. 2019. Studi Komparasi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

(Pendekatan Analisis Tipologi Kelas dan Analisis Indeks Williamson's). *Isei Economics Review* 3.1 : 28-34.

Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: AMP YKPN

Maipita, Indra, Wawan Hermawan, and Haikal Rahman. 2018. The Impact of Middle-Class towards Economic Growth and Income Inequality in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Malaysia*. 52.3 : 1-14.

Natha, S., Ketut, I., & Putri, N. P. V. S. 2015. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. *.E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4.1 : 1-5

Prawoto, N. 2010. Pengembangan potensi unggulan sektor pertanian. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 11.1 :1-19

Prawoto, N., Tribasuki A.T. 2014, *Pengantar Teori Ekonomi*, Mitra Pustaka Yogyakarta : Mandiri

Putra, Wiku Bhaskara. 2017. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten / Kota Wilayah Provinsi Jawa Timur. *Diss Universitas Sebelas Maret*.

Referensi: <https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html>

Sasana, Hadi. 2018. Revenue Discrepancy Determinant in Central Java Province (After a Decade of Autonomy and Fiscal Decentralization Implementation). *E3S Web of Conferences*. 73. EDP Sciences.

Siswosoemarto, Rubijanto. 2012. *Intelejen Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sukirno, Sadono. 2005. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPFE-UI

Sukirno, Sadono. 2013. *Makroekonomi Pengantar Teori*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syamsir, Andi, and Abdul Rahman. 2018. Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)* 5.1: 22-42.

Syilviarani, Anis Tunas. 2017. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2010-2015. *Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Sari, E. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015. *Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta*

Taharah, S. 2018. Ketimpangan Distribusi Pendapatan di DIY 2009-2015. *E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia* 73:16

Todaro, Michael P. 2003 *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi: Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.

Todaro M P, 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga.

Utomo, Bayu Dwi, Muhammad Arif. 2019. Analisis Pengaruh Ketimpangan, Jumlah Penduduk Miskin, Investasi Dan Ipm Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2011-2017 . *Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

SKRIPSI

**DETERMINAN KETIMPANGAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN /
KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Tahun 2011-2018**

***DETERMINANTS OF INCOME INEQUALITY IN YOGYAKARTA
SPECIAL REGION Period 2011-2018***

Diajukan oleh

**IMRO ATUS SHOLIKAH
20160430276**

Telah Disetujui
Dosen Pembimbing



Ahmad Ma'aruf, S.E., M.Si.
NIDN : 0512127201

Tanggal, 15 Februari 2020



SKRIPSI

**DETERMINAN KETIMPANGAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN /
KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Tahun 2011-2018**

***DETERMINANTS OF INCOME INEQUALITY IN YOGYAKARTA
SPECIAL REGION Periode 2011-2018***

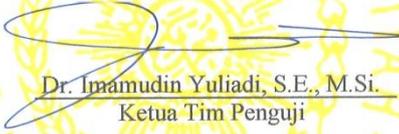
Diajukan oleh

**IMRO ATUS SHOLIKAH
20160430276**

Skripsi ini telah Dipertahankan dan Disahkan di depan Dewan Penguji Program
Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Tanggal 15 Februari 2020

Yang terdiri dari


Dr. Imamudin Yuliadi, S.E., M.Si.
Ketua Tim Penguji


Dr. Endah Saptutyningsih, S.E., M.Si.
Anggota Tim Penguji


Ahmad Ma'ruf, S.E., M.Si.
Anggota Tim Penguji

Mengetahui
Kaprosdi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Dr. Imamudin Yuliadi, S.E., M.Si.
NIK: 1964072319930343022

